

Account: Vol 7 No 2. *Leoni Dynka Eisano. Titi Suhartati. Novitasari*

ANALISIS IMPLEMENTASI AUDIT INTERNAL PADA KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PT BPR KRANJI KRIDA SEJAHTERA)

Leoni Dynka Eisano
leonieisano97@gmail.com

Titi Suhartati
b_titis@yahoo.com

Novitasari
novitasari26@gmail.com

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of internal audits on the quality of financial statements. This research approach is qualitative. The study was conducted at PT. BPR. Kranji Krida Sejahtera (BPR) which is engaged in banking by focusing on MSME entrepreneurs to improve the economic level of small and medium-sized communities. The object of this research is PT BPR Kranji Krida Sejahtera. The data used are primary data consisting of interviews and secondary data in the form of financial statements. Data analysis techniques were carried out through three stages, namely data reduction, data display, and conclusion. The results of this study indicate the effectiveness of the implementation of internal audit at PT BPR Kranji Krida Sejahtera is still relatively low. The benefit of this research is that this research can be used as a basis for redeveloping the implementation of internal audit principles, especially for financial reporting and to be used as a basis for the appointment of internal auditors

Keywords: *Internal Audit, Implementation, Effectiveness, Financial Report*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas implementasi audit internal pada kualitas laporan keuangan. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan pada PT BPR Kranji Krida Sejahtera yang merupakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bergerak di bidang perbankan dengan berfokus pada pengusaha UMKM untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Objek penelitian ini adalah PT BPR Kranji Krida Sejahtera. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis data yang dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi audit internal di PT BPR Kranji Krida Sejahtera masih tergolong rendah. Manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan kembali implementasi prinsip-prinsip audit internal khususnya terhadap pelaporan keuangan serta agar dijadikan landasan untuk penunjukkan auditor internal.

Kata kunci: *Audit Internal, Implementasi, Efektivitas, Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan lainnya. Definisi bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) yaitu bahwa, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Salah satu jenis bank adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa lalu lintas pembayaran adalah jasa yang diberikan perbankan untuk nasabah berupa kliring dan valuta asing. Tujuan umum BPR antara lain menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan kinerja BPR adalah dengan implementasi audit internal. Kegiatan audit internal dilaksanakan oleh auditor internal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4 / POJK.03 / 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa BPR wajib mewujudkan penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. Dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 7 / SEOJK.03 / 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat dikatakan juga bahwa audit intern harus dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dengan implementasi audit internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses kegiatan pelaporan keuangan di BPR sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan yang dapat terjadi.

Namun, pada kenyataannya, masih terdapat BPR yang belum memiliki auditor internal. Salah satu contoh BPR yang belum memiliki auditor internal adalah PT BPR Kranji Krida Sejahtera yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Meskipun begitu, pihak BPR ini menegaskan bahwa bentuk implementasi prinsip-prinsip audit internal telah dilakukan oleh dewan komisaris yang juga bertanggung jawab sebagai pengawas perusahaan. Prinsip audit internal di BPR ini diterapkan dengan tujuan utamanya yaitu bank dalam kondisi sehat. Indikator kesehatan bank

dapat dilihat melalui CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity*). Melalui CAMEL itulah, dewan komisaris memeriksa tingkat kesehatan bank. Meskipun demikian, hal ini tentu belum sepenuhnya sejalan dan sesuai dengan ketentuan OJK yang menyatakan BPR wajib memiliki auditor internal. Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya unit yang berfokus pada bidang audit internal ini menyebabkan BPR tersebut telah mendapat teguran dari OJK sebanyak 2 (dua) kali saat OJK melaksanakan pemeriksaan umum. Temuan lain yang juga disampaikan OJK setelah melakukan pemeriksaan umum di BPR ini selain yang berkaitan dengan implementasi audit internal adalah mengenai kualitas laporan keuangan BPR tersebut yaitu terdapat beberapa kesalahan dalam pelaporan laporan bulanan. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi BPR untuk mulai melakukan implementasi audit internal sesuai dengan aturan OJK agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaporan keuangan yang akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi audit internal khususnya terhadap pelaporan keuangan di PT BPR Kranji Krida Sejahtera yang telah diterapkan selama ini sudah seharusnya dievaluasi guna meningkatkan kinerja BPR tersebut.

Permasalahan

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk implementasi prinsip-prinsip audit internal terhadap pelaporan keuangan pada PT BPR Kranji Krida Sejahtera yang telah diterapkan selama ini?
2. Bagaimana efektivitas implementasi prinsip-prinsip audit internal terhadap kualitas laporan keuangan PT BPR Kranji Krida Sejahtera?

Tujuan

Merujuk pada permasalahan dan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk implementasi prinsip-prinsip audit internal terhadap pelaporan keuangan di PT BPR Kranji Krida Sejahtera yang telah diterapkan selama ini.

2. Mengetahui efektivitas implementasi prinsip-prinsip audit internal terhadap kualitas laporan keuangan PT BPR Kranji Krida Sejahtera.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Internal

Menurut Hery (2016), audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan perusahaan, auditor internal juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan bersama pihak manajemen perusahaan. Pelaksanaan audit internal juga dapat dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan yang memiliki kompetensi dalam bidang audit internal dan mampu melakukan tugasnya secara independen. Pada dasarnya audit internal adalah suatu alat agar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas seluruh pihak yang terlibat di dalam perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan sesuai dengan yang diharapkan (Arief, 2016).

Menurut Zamzami et. al. (2016), audit internal merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Berdasarkan beberapa definisi audit internal yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu penilaian yang dilakukan seorang auditor internal yang independen dan objektif untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu bentuk dari lembaga keuangan perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa lalu lintas pembayaran adalah jasa yang diberikan perbankan untuk nasabah berupa kliring dan valuta asing.

Kualitas Laporan Keuangan BPR

Bank di Indonesia sepenuhnya berada di pengawasan OJK sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan OJK termasuk dalam pelaporan keuangan. OJK mengeluarkan beragam peraturan terkait bentuk laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh bank, termasuk BPR. BPR wajib mengikuti ketentuan dari OJK dalam melaporkan laporan keuangannya. Kualitas dari laporan keuangan suatu BPR dapat dilihat dari bagaimana laporan keuangan tersebut dilaporkan, apakah telah memenuhi ketentuan OJK sepenuhnya atau belum.

Implementasi Audit Internal

OJK sebagai pengawas perbankan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan berbagai kebijakan terkait perbankan termasuk BPR. OJK juga telah mengeluarkan kebijakan terkait audit internal di BPR yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap BPR wajib memiliki auditor internal yang dapat menerapkan fungsi audit internal.

Pedoman pelaksanaan audit internal BPR tertuang pula dalam Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. Terdapat beberapa sanksi yang dapat diberikan oleh OJK apabila BPR tidak menerapkan fungsi audit internal sesuai ketentuan OJK seperti tercantum dalam Pasal 79 yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sanksi tersebut merupakan sanksi administratif yang dapat berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, dan/atau penghentian sementara kegiatan operasional BPR.

Pedoman lain yang dianggap penting dalam implementasi audit internal yaitu Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA). Meskipun mayoritas BPR merupakan bank kecil yang tentu hanya mengacu pada ketentuan OJK dalam kegiatan operasionalnya, namun prinsip-prinsip dasar tentang audit internal dalam standar yang dikeluarkan oleh IIA tersebut sebaiknya tetap perlu diterapkan dalam mengimplementasikan audit internal

agar BPR juga semakin profesional dalam mengimplementasikan audit internal.

Efektivitas implementasi audit internal dapat dilihat dari sudah seberapa jauh BPR memenuhi kriteria yang telah ditentukan OJK dalam pelaksanaan audit internal. Tidak hanya peraturan dari OJK, standar yang dikeluarkan oleh IIA terkait praktik audit internal juga dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui efektivitas audit internal, walaupun BPR hanya bank kecil.

Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank (CAMEL)

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat, dijelaskan bahwa BPR harus melaporkan perkembangan usahanya kepada OJK yang salah satunya meliputi rasio keuangan, dengan menyajikan paling sedikit meliputi KAP (Kualitas Aset Produktif), KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), NPL (*Non Performing Loan*), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif), ROA (*Return on Assets*), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), *cash ratio*, dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

Perhitungan KAP, KPMM, ROA, dan LDR merupakan salah satu perhitungan yang terdapat dalam analisis CAMEL. CAMEL adalah analisis untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Analisis CAMEL merupakan alat ukur tingkat kesehatan bank dengan melihat aspek *Capital*, *Asset*, *Management*, *Earnings*, dan *Liquidity*.

Perhitungan tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek *capital* dilakukan dengan menggunakan rumus CAR yang juga sama dengan rumus KPMM. CAR diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko). Oleh karena itu,

BPR yang memiliki CAR atau KPMM paling rendah sebesar 12%, dikategorikan dalam kondisi sehat dari aspek *capital*.

Selanjutnya, perhitungan tingkat kesehatan bank juga dilakukan dengan meninjau aspek *asset* yang dapat dihitung dengan perhitungan rasio Kualitas Aset Produktif (KAP). Perhitungan rasio KAP dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aset Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Aset Produktif}} \times 100\%$$

Aset Produktif yang Diklasifikasikan diperoleh dengan ketentuan:

1. 0% dari kredit lancar
2. 25% dari kredit dalam perhatian khusus
3. 50% dari kredit kurang lancar
4. 100% dari kredit macet

Hasil yang diperoleh akan dapat menentukan tingkat kesehatan bank dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 0,00% - ≤ 10,35%, bank dikategorikan sehat
2. 10,35% - ≤ 12,60%, bank dikategorikan cukup sehat
3. 12,60% - ≤ 14,85%, bank dikategorikan kurang sehat
4. 14,85%, bank dikategorikan sakit

Pengukuran tingkat kesehatan bank berikutnya juga dapat dilihat dari aspek *management*. *Management* dapat dinilai secara kualitatif dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank dan secara kuantitatif melalui penghitungan *Net Profit Margin* (NPM). NPM diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tujuan perhitungan NPM adalah mengukur keberhasilan keseluruhan bisnis yang dijalankan. NPM yang tinggi menunjukkan bank berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Semakin besar nilai NPM, biaya yang dikeluarkan semakin efisien dan semakin besar tingkat pengembalian laba bersih serta bank termasuk dalam kategori sehat dari aspek *management*.

Earning juga dapat menjadi acuan untuk melihat tingkat kesehatan bank. *Earning* dapat diukur melalui *Return on Asset*

(ROA).ROA diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Hasil yang diperoleh akan dapat menentukan tingkat kesehatan bank dengan ketentuan sebagai berikut:

1. = 1,215%, bank dikategorikan sehat
2. = 0,999% - < 1,215%, bank dikategorikan cukup sehat
3. 0,765% - < 0,999%, bank dikategorikan kurang sehat
4. < 0,765%, bank dikategorikan tidak sehat

Faktor lain yang dapat pula dijadikan acuan untuk menentukan tingkat kesehatan bank adalah *Liquidity*. *Liquidity* dapat diukur melalui *Loan Deposit Ratio* (LDR).LDR diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Hasil yang diperoleh akan dapat menentukan tingkat kesehatan bank dengan ketentuan sebagai berikut:

1. $\leq 94,75\%$, bank dikategorikan sehat
2. $94,75\% - \leq 98,50\%$, bank dikategorikan cukup sehat
3. $98,50\% - \leq 102,25\%$, bank dikategorikan kurang sehat
4. $102,25\%$, bank dikategorikan tidak sehat

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebab data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif.Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa jawaban-jawaban yang dihasilkan dari kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah PT BPR Kranji Krida Sejahtera yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah *primary data* dan *secondary data*.*Primary data* tersebut berupa hasil wawancara, hasil observasi, dan

responden individu.Sementara *secondary data* yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi.Peneliti mewawancarai direktur utama, kepala bagian operasional dan seorang anggota dewan komisaris. Wawancara tersebut membahas topik yang berhubungan dengan informasi mengenai bentuk-bentuk implementasi audit internal terhadap pelaporan keuangan pada PT BPR Kranji Krida Sejahtera. Selain itu, peneliti mengobservasi dengan mengamati langsung proses pelaporan keuangan dan proses kegiatan audit tanpa berpartisipasi aktif dalam pelaporan keuangan maupun kegiatan audit yang dilakukan.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan reduksi data dimana peneliti terlebih dahulu menyaring data-data yang dapat berguna bagi penelitian ini. Data-data yang dapat berguna dari penelitian ini antara lain bentuk-bentuk implementasi prinsip audit internal, kegiatan pelaporan keuangan, dan laporan keuangan. Analisis data kemudian dilanjutkan dengan penyajian data (*data display*). Peneliti menyajikan data dengan pola yang akan membantu data tersebut dipahami. Analisis data diakhiri dengan penarikan kesimpulan oleh peneliti yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan CAMEL PT BPR Kranji Krida Sejahtera

Implementasi dari audit internal yang telah diterapkan selama ini oleh PT BPR Kranji Krida Sejahtera adalah dengan berfokus pada CAMEL BPR tersebut. Perhitungan CAMEL berikut ini diperoleh dari data-data keuangan bulan Desember 2018.

Keterangan:

- M : Modal
ATMR : Aset Tertimbang Menurut Risiko
APD : Aset Produktif Diklasifikasikan
TAP : Total Aset Produktif
LB : Laba Bersih

Aspek	Formula	Perhitungan	Tingkat Kesehatan Bank
Capital (CAR)	$(M/ATMR) \times 100\%$	$\frac{3.714.295.925}{21.017.339.873} \times 100\% = 17,673\%$	Sehat
Asset (KAP)	$\frac{(APD / TAP) \times 100\%}{100\%}$	$\frac{(1.037.099.883 / 21.705.890.564) \times 100\%}{100\%} = 4,778\%$	Sehat
Managemen (NPM)	$(LB / PO) \times 100\%$	$\frac{(1.037.599.669 / 3.294.853.000) \times 100\%}{100\%} = 31\%$	Sehat
Earning (ROA)	$(LB / TA) \times 100\%$	$\frac{(1.037.599.669 / 21.017.339.873) \times 100\%}{100\%} = 4,937\%$	Sehat
Liquidity (LDR)	$\frac{(KYD / DD) \times 100\%}{100\%}$	$\frac{(19.685.890.564 / 26.252.010.813) \times 100\%}{100\%} = 74,988\%$	Sehat

PO : Pendapatan Operasional
 TA : Total Aset
 KYD : Kredit yang Diberikan
 DD : Dana yang Diterima

Efektivitas Implementasi Audit Internal PT BPR Kranji Krida Sejahtera

Apabila hanya mengacu pada perhitungan CAMEL, implementasi audit internal dapat dikatakan telah berjalan efektif sebab nilai CAMEL PT BPR Kranji Krida Sejahtera mengindikasikan bank dalam kondisi sehat. Namun, pada kenyataannya, lingkup audit internal BPR tidak hanya terbatas pada nilai CAMEL. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat terdapat Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat yang menguraikan berbagai pedoman terkait penerapan audit internal di setiap BPR. Seharusnya, setiap BPR mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh OJK tersebut dalam menerapkan audit internal.

Pedoman lain yang dianggap penting dalam implementasi audit internal yaitu

Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA). Meskipun mayoritas BPR merupakan bank kecil yang tentu hanya mengacu pada ketentuan OJK dalam kegiatan operasionalnya, namun prinsip-prinsip dasar tentang audit internal dalam standar yang dikeluarkan oleh IIA tersebut sebaiknya tetap perlu diterapkan dalam mengimplementasikan audit internal agar BPR juga semakin profesional dalam mengimplementasikan audit internal.

Efektivitas implementasi audit internal dapat dilihat dari seberapa jauh pedoman-pedoman terkait audit internal tersebut telah dipenuhi BPR. Berikut merupakan efektivitas implementasi audit internal pada PT BPR Kranji Krida Sejahtera mengacu kepada pedoman dari OJK dan IIA berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan:

Sumber Pedoman	Standar yang Berlaku	Implementasi di BPR (Terpenuhi/Belum Terpenuhi)
IIA	Implementasi audit internal dilakukan oleh seseorang yang independen dan obyektif	Belum Terpenuhi
IIA	Implementasi audit internal dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	Belum Terpenuhi
IIA	Adanya pemberian evaluasi dan pemberian kontribusi dalam peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi	Terpenuhi
IIA	Adanya evaluasi potensi timbulnya kecurangan dan bagaimana mengelola risiko tersebut	Terpenuhi
SE OJK	Implementasi audit internal dilakukan dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan	Belum Terpenuhi

	kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen	
SE OJK	Adanya identifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana	Terpenuhi
SE OJK	Adanya proses perencanaan audit yang terdiri dari: 1. Penentuan tujuan audit 2. Penentuan jadwal kerja audit 3. Rencana sumber daya manusia dan anggaran	Belum Terpenuhi
SE OJK	Adanya penilaian atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal	Belum Terpenuhi
SE OJK	Adanya pelaporan hasil dari implementasi audit internal secara tertulis	Belum Terpenuhi
SE OJK	Hasil dari laporan implementasi audit internal disimpan dengan baik	Belum Terpenuhi

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa dari sepuluh pernyataan yang telah dirangkum terkait keefektifan implementasi audit internal BPR dengan mengacu pada IIA dan pedoman dari OJK yang telah dirangkum, hanya tiga poin saja yang sepenuhnya telah dijalankan oleh pihak PT BPR Kranji Krida Sejahtera. Masih terdapat tujuh poin lainnya yang belum dijalankan oleh BPR ini dalam mengimplementasikan audit internalnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi audit internal di BPR ini, apabila mengacu pada berbagai poin dalam peraturan OJK dan standar dari IIA, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan masih terdapat banyak ketentuan atau kriteria yang belum terpenuhi. BPR hanya melaksanakan implementasi audit internalnya sesuai dengan kebijakannya sendiri dan tidak sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku

Kualitas Laporan Keuangan PT BPR Kranji Krida Sejahtera

Mengingat bahwa kualitas laporan keuangan BPR dapat dilihat dari seberapa jauh BPR tersebut telah memenuhi semua persyaratan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan OJK, maka pelaporan keuangan kemudian ditelaah apakah telah sesuai dengan ketentuan OJK secara menyeluruh sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Terdapat beberapa hal yang belum dilaporkan PT BPR Kranji Krida Sejahtera sesuai dengan ketentuan OJK yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat. Hal-hal berikut ini belum dilaporkan PT BPR Kranji Krida Sejahtera dalam Laporan Tahunan Tahun 2018:

1. KAP (Kualitas Aset Produktif), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif), dan *cash ratio*. Ketiga hal ini seharusnya dilaporkan dalam Laporan Tahunan pada bagian Informasi Umum.
2. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain. Hal ini seharusnya dilaporkan pada bagian Laporan Manajemen.
3. Opini dari akuntan publik apabila Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh akuntan publik. Padahal, Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2018 PT BPR Kranji Krida Sejahtera ini diaudit oleh akuntan publik. Namun, karena alasan keterbatasan waktu, pelaksanaan audit oleh KAP tertunda dan opini dari akuntan publik pun tak dapat disertakan dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2018.
4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait
6. Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR

Meskipun demikian, secara keseluruhan pada dasarnya PT BPR Kranji Krida Sejahtera ini telah menyusun Laporan Tahunan Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan

OJK karena sebagian besar dari Laporan Tahunan Tahun 2018 ini telah memenuhi ketentuan OJK yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Laporan Tahunan PT BPR Kranji Krida Sejahtera Tahun 2018 secara garis besar telah memenuhi kriteria OJK namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan OJK. BPR seharusnya lebih memperhatikan ketentuan OJK serta melakukan *management* waktu yang lebih baik agar laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan komprehensif. Apabila terdapat auditor internal, tentu kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diminimalisir sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a. PT BPR Kranji Krida Sejahtera belum memiliki auditor internal karena fungsi dari auditor internal tersebut dirasa masih dapat ditangani oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Alasan lain mengapa BPR ini belum memiliki auditor internal adalah untuk efisiensi biaya mengingat BPR ini masih tergolong BPR kecil.
- b. PT BPR Kranji Krida Sejahtera mengimplementasikan prinsip-prinsip audit internal meskipun tidak memiliki auditor internal. Implementasi tersebut dilakukan dengan cara mengutamakan nilai CAMEL BPR yaitu indikator tingkat kesehatan bank. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kerap memeriksa nilai CAMEL dari waktu ke waktu untuk memastikan BPR tetap berada dalam kondisi sehat.
- c. Implementasi prinsip-prinsip audit internal terhadap pelaporan keuangan dilakukan dengan memeriksa kembali hasil laporan keuangan yang dikeluarkan oleh sistem dan memeriksa keakuratan nilai CAMEL yang dilakukan oleh bagian *accounting*. Selain itu, implementasi tersebut juga dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara laporan keuangan yang dihasilkan dengan

ketentuan-ketentuan OJK terkait pelaporan keuangan.

- d. Efektivitas implementasi audit internal pada kualitas laporan keuangan BPR masih tergolong rendah karena banyak hal dari pedoman IIA dan OJK yang belum dipenuhi oleh BPR ini dan laporan keuangan yang dihasilkan masih memiliki kekurangan atau belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang diatur OJK

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. PT BPR Kranji Krida Sejahtera diharapkan segera menunjuk auditor internal yang profesional dan independen. Selain karena memang sudah seharusnya BPR memiliki auditor internal sesuai dengan ketentuan OJK, peran auditor internal dianggap penting karena membantu dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya auditor internal, kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan diharapkan dapat diminimalisir mengingat auditor internal akan secara rutin menerapkan fungsi audit internal pada pelaporan keuangan. Selain itu, penunjukkan auditor internal juga bertujuan untuk menghindari sanksi yang dapat diberikan OJK antara lain teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, dan/atau penghentian sementara kegiatan operasional BPR.
2. PT BPR Kranji Krida Sejahtera dapat menunjuk salah seorang dari bagian *accounting* untuk dijadikan sebagai auditor internal dengan cara diberikan berbagai pelatihan (*training*) atau diikutsertakan dalam sertifikasi CBIA (*Certified Bank Internal Audit*).
3. PT BPR Kranji Krida Sejahtera disarankan membentuk *code of conduct*, atau *job description* yang merupakan perangkat-perangkat terkait dengan tugas audit internal agar kegiatan audit internal tersebut dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, R. (2016, Mei). Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan yang Dilakukan Oleh Audit

- Eksternal pada Sebuah Perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, 7.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. (1997). *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).
- Beest, F. v., Braam, G., & Boelens, S. (2009, April). Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. *Nijmegen Center for Economics (NiCE) Working Paper*, 09-108.
- Cooper, D., & Schindler, P. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis (Edisi 12)*. Jakarta: McGraw-Hill/Irwin dan Salemba Empat.
- Elder, R. J., Beasley, S. M., Arens, A. A., & Yusuf, A. A. (2011). *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erfiansyah, E., & Kurnia, I. (2018, Januari). Peranan Auditor Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survey pada BPR di Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2.
- Hamidi, M. (2017). Studi Komparasi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat. *IQTISHADIA*, 10.
- Hery. (2016). *Auditing dan Asurans*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia . (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Memahami Audit Intern Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Junus, O., & Lagata, N. (2017, April). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Metode CAMEL di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10, 131-152.
- Kaunang, A. F. (2015). *Pedoman Audit Internal*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2001). 2. *Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001, Tanggal 9 November tentang Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta.
- Moleong, P. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oktaviana, L. (2015, April). Peran Audit Internal Guna Meningkatkan Kinerja (Studi Kasus di PT BPR Armindo Kencana Malang). *Parsimonia*, 2.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan OJK Nomor 56 / POJK.04 / 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi bagi BPR*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik*

- Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Prastiwi, D. R. (2017). *Analisis Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit Berbasis COSO Studi Kasus di BPR Chandra Muktiartha*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Presiden Republik Indonesia. (1989). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Purwanti, Y. (2016). *Analisis Kinerja Auditor Internal dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada BPR Shinta Putra Pengasih Kulon Progo*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Puspawardhani, A. D. (2015). *Analisis Prosedur Auditor Internal dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT BPR Chandra Muktiartha*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Putri, I. A., Ulupui, I., & Wirawati, N. P. (2017, Januari). Pengaruh Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12, 17-24.
- Safri, M., & Rakhmadi, S. (2013, April). Prospek Pendirian BPR di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1.
- Sesiady, N. A., AR, M. D., & Saifi, M. (2018, Agustus). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BPR Nusamba Wlingi Cabang Kepanjen). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 61.
- The Institute of Internal Auditors. (2016). *International Professional Practices Framework*. Florida: The Institute of Internal Auditors.
- Uma Sekaran, R. B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis (Edisi 6)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zamzami, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2016). *Audit Internal Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.